



**SALINAN**

**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA DEPOK  
YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta untuk mewujudkan salah satu misi Pembangunan Kota Depok yakni mewujudkan sumber daya manusia unggul, kreatif dan religius sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Depok Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Depok Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Depok;

- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Menengah Pertama, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Depok Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Depok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA DEPOK YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota, adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Depok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kota Depok.
9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
14. Warga masyarakat adalah penduduk Kota Depok, penduduk luar Kota Depok, dan warga negara asing yang tinggal di Kota Depok.
15. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

16. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri, adalah program Pemerintah Kota dalam bentuk pendanaan biaya operasional non personal bagi satuan pendidikan SMP Negeri.
17. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
18. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
19. Biaya operasional satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
22. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
23. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menghimpun, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang membuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran.



25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang membuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran.
26. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
29. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
30. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
31. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**

**Bagian Kesatu**

**Maksud**

**Pasal 2**

Maksud dari pemberian dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan SMP Negeri.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 3**

- (1) Tujuan pemberian dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri adalah untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada SMP Negeri.
- (2) Tujuan Pendidikan SMP Negeri adalah untuk:
  - a. membebaskan biaya operasional pendidikan pada SMP Negeri;
  - b. meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan pada SMP Negeri;
  - c. memberikan tambahan biaya operasional non personalia dan honorarium pendidik non PNS dan tenaga kependidikan non PNS pada SMP Negeri;
  - d. melengkapi kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran pada SMP Negeri;
  - e. memelihara sarana dan prasarana pendidikan SMP Negeri;
  - f. meningkatkan pengelolaan mutu pendidikan melalui peningkatan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

**BAB III**  
**PENERIMA DANA PEMBIAYAAN**  
**PENYELENGGARAAN SMP NEGERI**

**Pasal 4**

- (1) Sekolah penerima dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri adalah semua SMP Negeri di Kota Depok.
- (2) Besaran pembiayaan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri, ditentukan berdasarkan jumlah siswa.

**Pasal 5**

Penyaluran dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri dilakukan, sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

**Pasal 6**

- (1) Untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri, dibentuk Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Tingkat Kota dan Tingkat Sekolah.
- (2) Tim manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMPN Tingkat Kota ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Tingkat Sekolah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sekolah.

**BAB IV**  
**PENGUNAAN DANA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN SMP NEGERI**

**Pasal 7**

Proses penetapan alokasi dana, penyaluran, pengambilan, dan pelaporan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri, tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 8**

- (1) Penggunaan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri adalah untuk biaya operasional sekolah.
- (2) Penggunaan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah mendapat persetujuan dari Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam proposal pengajuan pencairan dana.
- (4) Penggunaan belanja barang dan jasa, cetak modul dan cetak lainnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan perencanaan yang disusun dalam RKAS.
- (5) Penggunaan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri untuk belanja Pegawai disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
- (6) Penggunaan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk membayar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (honorar) guna memenuhi SPM.
- (7) Penggunaan belanja modal diperuntukan untuk peralatan penunjang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan penunjang lainnya.

## **BAB V**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 9**

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Tingkat Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap penggunaan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Untuk mengurangi atau menghindari penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Depok Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Depok Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 15).

### **Pasal 13**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 30 Maret 2017

**WALI KOTA DEPOK,**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 30 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**HARRY PRIHANTO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 17**

SESUAL DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



**N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197001271998032004**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA  
DEPOK YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA DEPOK**

**PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**

**A. Proses Penetapan Alokasi Dana**

Penetapan alokasi dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. sekolah mengusulkan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri dengan mengisi data formulir pendataan yang dilampiri RKAS untuk diserahkan kepada Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Tingkat Kota;
2. atas dasar data jumlah siswa setiap sekolah, Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Kota membuat alokasi dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
3. usulan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan tersebut disampaikan kepada BAPPEDA sebagai dasar penyusunan RKPD tahun berkenaan;
4. berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun, Wali Kota menyusun KUA/PPAS untuk dibahas dan disetujui bersama DPRD Kota Depok untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan APBD tahun berkenaan;
5. penyusunan RKA/DPA Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri, oleh Dinas Pendidikan disusun berdasarkan RKAS dari tiap-tiap sekolah yang diuraikan dalam belanja pegawai, belanja barang/jasa dan Belanja Modal;

6. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan;
7. satuan besaran Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri adalah Rp. 95.000,-/peserta didik/tahun yang dicairkan setiap triwulan.

#### **B. Proses Pencairan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri.**

Proses pencairan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri dilaksanakan melalui mekanisme pembiayaan yang dilakukan satu tahun oleh bendahara pengeluaran kegiatan melalui rekening masing-masing sekolah dengan langkah sebagai berikut:

1. setelah DPA-PD disahkan oleh PPKD, Dinas mengusulkan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada PPKD;
2. berdasarkan permohonan pencairan dari sekolah, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) merekapitulasi usulan dari masing-masing sekolah sebagai dasar pengajuan SPP-TU;
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) mengajukan Surat Perintah Pembayaran-Tambah Uang (SPP-TU) kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan-PD (PPK-PD) untuk mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. PPK-PD melakukan penelitian kelengkapan dokumen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri yang diajukan, apabila dokumen dinyatakan lengkap dan sah maka Pengguna Anggaran dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. berdasarkan SPM yang telah diterbitkan, berkas diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
6. bendahara pengeluaran pembantu segera melakukan pemindahbukuan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri yang diterima kepada rekening masing-masing sekolah;
7. pencairan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri yang sudah masuk ke rekening sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah;
8. pengeluaran belanja oleh Bendahara Sekolah dilaksanakan sesuai dengan jenis belanja pada DPA-PD dan berdasarkan RKAS yang telah disepakati;



9. perubahan antar jenis Belanja pada DPA kegiatan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMPN hanya dapat dilakukan melalui mekanisme APBD Perubahan.

### **C. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri.**

Pertanggungjawaban dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri dilakukan oleh masing-masing SMP Negeri, yang disusun oleh Bendahara Sekolah melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dinas Pendidikan secara triwulanan.

Proses pencairan dana pada triwulan berikutnya dapat dilakukan apabila Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri, sekolah telah menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan dana pada triwulan sebelumnya, termasuk kewajiban perpajakan.

### **D. Pelaporan**

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri, masing-masing pengelola kegiatan di tiap tingkatan (Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Kota dan Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana kegiatan adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

1. Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertama Negeri Kota

Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Kota adalah sebagai berikut:

- a. rekapitulasi penggunaan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri, Sekolah dengan menggunakan formulir yang disediakan;
- b. rekapitulasi pembelian barang inventaris sekolah pada tahun anggaran berkenaan;

- c. penanganan pengaduan masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian;

Laporan ini diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya dan tanggal 5 Juli tahun berjalan.

2. Tim Manajemen dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Kota adalah sebagai berikut:

- a. penggunaan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMPN dengan menggunakan formulir yang sudah ditentukan;
- b. lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran;
- c. lembar pencatatan pengaduan.

Pembelian semua barang inventaris sekolah pada tahun anggaran berkenaan, baik yang bersumber dari dana APBD Kota, APBD Propinsi, APBN dan berasal dari Komite Sekolah maupun sumbangan/ hibah pihak lain.

Laporan ini diserahkan kepada Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota paling lambat tanggal 3 Januari tahun berikutnya dan tanggal 3 Juli tahun berjalan

**E. Beberapa ketentuan tambahan terkait penetapan alokasi, penyaluran, pemanfaatan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri adalah sebagai berikut:**

1. besaran pembiayaan kegiatan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ditentukan berdasarkan jumlah siswa, hal ini dimaksudkan hanya sebagai dasar perencanaan penganggaran dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan. Dengan demikian, apabila:
  - a. terdapat kekurangan/kelebihan alokasi dana sebagai akibat terjadi peserta didik pindah/mutasi maka penambahan/pengurangan alokasi dana dilaksanakan melalui mekanisme perubahan APBD;

- b. terdapat peserta didik pindah/mutasi ke Sekolah lain setelah pencairan dana pada bulan berjalan, maka alokasi dana tersebut tetap diperhitungkan sebagai alokasi dana pada sekolah lama dan harus digunakan sesuai RKAS;
  - c. terdapat sisa dana di sekolah pada triwulan berjalan maka dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah;
  - d. sisa dana di sekolah wajib dikembalikan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan setiap triwulan, sedangkan untuk sisa dana pada akhir tahun anggaran wajib dikembalikan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 26 Desember tahun berkenaan.
2. setiap pengeluaran belanja oleh sekolah harus mengacu pada RKAS dan menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Walikota pada tahun berkenaan dan dimaksudkan sebagai batasan standar harga tertinggi;
3. pemungutan dan penyetoran Pajak dilakukan oleh bendahara sekolah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pembelian Barang/Jasa di sekolah dilakukan oleh tim sekolah yang ditetapkan oleh kepala sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi;
  - b. memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga;
  - c. membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa;
  - d. diketahui oleh Komite Sekolah;
  - e. terkait dengan biaya untuk rehabilitasi ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMPN, sekolah harus : membuat rencana kerja; memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah mengacu pada standar satuan Belanja Personalia yang ditetapkan oleh keputusan Walikota.

5. Terhadap setiap barang inventaris yang telah dibeli, sekolah wajib melakukan pencatatan terhadap hasil pembelian tersebut. Ada 2 tahap pencatatan yang harus dilakukan oleh sekolah, yaitu penerimaan, serta penyimpanan dan penggunaan:

- a. Penerimaan

Barang Inventaris yang diterima oleh sekolah sebagai hasil pembelian dicatat dalam buku penerimaan barang sebagai bukti penerimaan barang. Barang yang diterima atas pembelian harus dicocokkan dengan surat perintah kerja atau surat pemesanan yang ditandatangani Kepala sekolah, yang dicocokkan berdasarkan jenis, jumlah barang, harga barang, dan kondisi fisik barang. Jika jumlah/harga sesuai dan kondisi barang baik, maka barang dapat diterima. Jika tidak, maka sebaiknya ditangguhkan atau diberi catatan.

- b. Penyimpanan dan Penggunaan

Seluruh barang inventaris yang telah dicatat penerimaannya oleh sekolah pada tahap selanjutnya harus dicatatkan dalam buku inventaris barang. Buku inventaris ini berfungsi untuk melihat kuantitas barang yang diterima, dipinjamkan ke peserta didik apabila ada dan yang ada di sekolah.

6. Pelaporan barang inventaris

- a. paling lambat 5 hari setelah tahun anggaran berakhir, Sekolah wajib melaporkan setiap hasil pembelian barang inventaris kepada Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri, Kota dengan rincian jumlah dan harga setiap barang yang dibeli.

- b. tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMPN Kota membuat rekapitulasi hasil pembelian barang inventaris seluruh sekolah dengan rincian jumlah dan harga barang yang dibeli untuk disampaikan kepada Bendahara Pengurus Barang Dinas Pendidikan sebagai dasar pencatatan dalam Neraca pada Laporan Keuangan Dinas. Hasil rekapitulasi barang inventaris yang dibeli oleh sekolah pada tahun berkenaan harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tahun anggaran berakhir.

7. Penggunaan dan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri tidak diperbolehkan untuk membiayai Belanja Pengeluaran yang sudah terpenuhi dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat dan dana lainnya atau sebaliknya.

**WALI KOTA DEPOK,**

**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**